

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693001/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (12) LAMPUNG
- 4. Kode/Nama Satker : (693001) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 2.235.138.000 (DUA MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA SERATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.235.138.000
Rp. 2.235.138.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.235.138.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 2.235.138.000

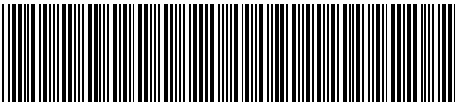
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9004-0073-9255-5103

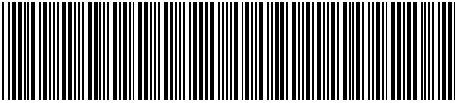
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693001) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							2.235.138.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							2.235.138.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					150,00 orang	135.000.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual					150.00 orang	135.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					2,00 layanan	1.762.058.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	899.715.000
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah					1.00 layanan	862.343.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik					2,00 dokumen, Peta, Data	338.080.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah					2.00 Data	338.080.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
I B. SUMBER DANA



DS:9004-0073-9255-5103

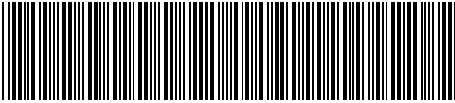
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693001) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.235.138.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9004-0073-9255-5103

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (693001) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

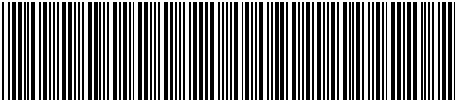
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693001	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	-	2.235.138	-	-	-	2.235.138	12 . 00	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.235.138	-	-	-	2.235.138		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.235.138	-	-	-	2.235.138		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	135.000	-	-	-	135.000		
04	PNBP	-	135.000	-	-	-	135.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	1.762.058	-	-	-	1.762.058		
04	PNBP	-	1.762.058	-	-	-	1.762.058		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (12.00 LAMPUNG / LAMPUNG)	-	338.080	-	-	-	338.080	12 . 00	
04	PNBP	-	338.080	-	-	-	338.080	017@	
JUMLAH		-	2.235.138	-	-	-	2.235.138		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9004-0073-9255-5103

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (693001) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

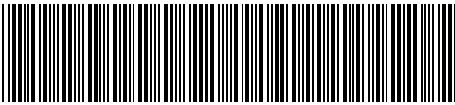
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693001	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	428.342	254.966	244.257	222.186	272.645	415.842	108.739	69.180	136.419	58.290	24.272	2.235.138
		BELANJA BARANG	0	428.342	254.966	244.257	222.186	272.645	415.842	108.739	69.180	136.419	58.290	24.272	2.235.138
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	428.342	254.966	244.257	222.186	272.645	415.842	108.739	69.180	136.419	58.290	24.272	2.235.138
135.05.BF.7121		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	428.342	254.966	244.257	222.186	272.645	415.842	108.739	69.180	136.419	58.290	24.272	2.235.138

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
IV A. B L O K I R



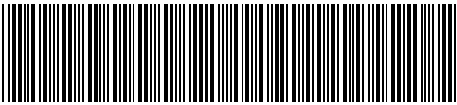
DS:9004-0073-9255-5103

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693001] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693001	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.567
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 773.422		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	52 Belanja Barang Rp. 773.422	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.500
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.643	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.740	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.103
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.441
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.750	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 199.245
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	7121.BMA	Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.539		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.261
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
IV A. B L O K I R



DS:9004-0073-9255-5103

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693001] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

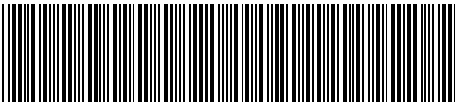
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.682 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.351 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693001/2026
IV B. C A T A T A N



DS:9004-0073-9255-5103

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [693001] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001